



**Pemerintah Provinsi Jambi**

**BIRO ORGANISASI SETDA  
PROVINSI JAMBI**

**Jl. Jend. A. Yani No. 1  
Telanaipura Jambi**

# **LAPORAN KINERJA (LKj) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi tahun 2018 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Setda Provinsi Jambi tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Setda Provinsi Jambi yang telah ditetapkan.

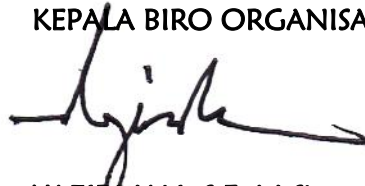
Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja mempunyai 2 (dua) fungsi : 1) Sebagai media pertanggungjawaban kinerja ; 2) Sebagai sumber informasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sehubungan dengan fungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja tersebut, maka informasi kinerja diungkapkan tidak terbatas hanya pada keberhasilan pencapaian sasaran tetapi juga pada kekurangan bahkan kegagalan pencapaian sasaran yang telah direncanakan beserta penjelasan - penjelasannya.

Akhirnya, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan LKj Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 ini. Kami menyadari LKj ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga LKj ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Jambi, Januari 2019

**KEPALA BIRO ORGANISASI,**



**YAZIRMAN, S.E., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600222 199003 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 , merupakan bagian dari rentang waktu implementasi Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jambi yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. LKj Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja selama pelaksanaan anggaran Tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .

Rencana kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang dilaksanakan sesuai dengan Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang membawahi 3 (tiga) Bagian, dan 9 (sembilan) Sub Bagian yang bertanggung jawab melaksanakan rencana kinerja Biro Organisasi Setda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa hasil capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama Tahun 2018 telah berhasil mencapai sasaran prioritas yakni pelaksanaan penataan kelembagaan daerah, tatalaksana, pelayanan publik, koordinasi akuntabilitas, anjab dan ABK serta pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Setda Provinsi Jambi yang ditargetkan, meskipun secara keseluruhan belum dapat dicapai pada Tahun 2018 ini.

Disadari bahwa capaian kinerja dimaksud, baik yang telah berhasil maupun yang masih perlu peningkatan merupakan bahan pelajaran yang sangat berharga dalam peningkatan kinerja unit kerja di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis atas kinerja Tahun 2018 tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah penting sebagai strategi dalam pemecahan permasalahan pada masa-masa yang akan datang, dan tidak terlepas dari strategi kebijakan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi antara lain :

1. Mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan fokus pada koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan secara maksimal.
2. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaksanaan.
3. Konsistensi dalam melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak lain dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Tetap memegang teguh azas efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang tersedia serta tepat waktu dan sasaran dalam setiap langkah pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan dan pembangunan di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
2.1. Perencanaan .....	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Setda Provinsi Jambi .....	8
2.1.1.2 Tujuan .....	8
2.1.1.3 Sasaran .....	9
2.2. Visi dan Misi .....	9
2.3. Kebijakan .....	10
2.4. Program .....	11
2.5. Penetapan Kinerja .....	11
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	
Analisis Capaian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	13
BAB IV    PENUTUP .....	30

# *BAB I*

# *PENDAHULUAN*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Biro Organisasi Setda merupakan unsur staf di jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Secara Organisasi, Biro Organisasi Setda ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

BAB I berisi :

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 121 ayat 1, bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga-lembaga teknis daerah.

### B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pergub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja aparatur serta melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian Setda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah, Biro Organisasi mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengoordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, Biro Organisasi mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan di bidang organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, kepegawaian sekretariat daerah dan analisis jabatan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah dan budaya kerja.
3. Pengordinasian, pembinaan, penataan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kelembagaan perangkat daerah provinsi,kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja aparatur.
5. Pengorganisasian, pembinaan, penunjuk teknis, dan pengembangan,pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Pengorganisasian, pembinaan, petunjuk teknis, dan pengembangan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7. Pelaksanaan program pembinaan/konsultasi/koordinasi/fasilitasi/ di bidang budaya kerja.



8. Pelaksanaan program di bidang analisis jabatan dan beban kerja.
9. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian sekretariat daerah.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Biro Organisasi dibantu oleh :

- a. Kepala Bagian Kelembagaan
- b. Kepala Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi
- c. Kepala Bagian Kepegawaian Setda dan Analisis Jabatan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Kepegawaian Setda dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi, antara lain :

- a. penyiapan bahan dan data untuk penyusunan rencana di bidang administrasi kepegawaian sekretariat daerah, dan budaya kerja;
- b. pengumpulan bahan untuk penyusunan program/ kegiatan pembinaan/konsultasi/koordinasi/fasilitasi di bidang budaya kerja;
- c. penyiapan bahan pembinaan budaya kerja dalam rangka pengembangan kinerja aparatur;
- d. penyiapan bahan konsultasi di bidang budaya kerja;
- e. penyiapan bahan koordinasi di bidang budaya kerja;
- f. penataan pelaksanaan program/ kegiatan fasilitasi di bidang budaya kerja;
- g. perencanaan kegiatan kepegawaian;
- h. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian;
- i. pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara lingkup sekretariat daerah meliputi penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai, usulan kebutuhan diklat struktural/fungsional, usulan jabatan, kenaikan pangkat, pensiun dan penataan kebutuhan pegawai;
- j. pengumpulan bahan, pengelompokan dan verifikasi bahan usulan kenaikan pangkat sebelum meneruskannya ke badan kepegawaian daerah;
- k. pelaksanaan dan pengevaluasian disiplin aparatur salah satunya melalui program handkey;
- l. penyiapan penetapan keputusan kenaikan gaji berkala dan pemindahan PNS lingkup sekretariat daerah;
- m. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;

- n. penyiapan bahan penetapan kartu-kartu kepegawaian;
- o. penyiapan bahan administrasi kepegawaian sekretaris daerah, asisten dan staf ahli;
- p. penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi antara lain :

- a. pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bagian kelembagaan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja bagian kelembagaan;
- c. pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur bagian kelembagaan;
- d. pengoordinasian pembentukan tim terkait dengan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah provinsi, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B) dan cabang dinas provinsi serta Tim pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/ kota;
- e. pelaksanaan verifikasi bahan terkait dengan usulan pembentukan perangkat daerah provinsi, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B), cabang dinas Provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan telaahan ke atasan terkait pembentukan perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B), cabang dinas provinsi serta perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan telaahan ke atasan terkait dengan usulan Raperda pembentukan perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B), cabang dinas Provinsi serta perangkat daerah kabupaten/kota;
- h. pengoordinasian pelaksanaan bahan perumusan dalam rangka usulan raperda pembentukan perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B), cabang dinas provinsi serta perangkat daerah kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan rapat dengan DPRD terkait dengan pembentukan perangkat daerah provinsi;
- j. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke pemerintah pusat terkait dengan pembentukan perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B) dan cabang dinas provinsi serta perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. pengoordinasian dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap Raperda perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B) dan cabang dinas provinsi;
- l. pengoordinasian Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda perangkat daerah oleh Kepala Daerah;
- m. pengoordinasian, pengkajian dan perumusan peraturan kepala daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B) dan cabang dinas provinsi;

- n. pengoordinasian terkait dengan rekomendasi pembentukan perangkat daerah kabupaten/kota;
- o. pengoordinasian penyusunan data base perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi, antara lain :

- a. penyusunan bahan koordinasi pembinaan, petunjuk teknis, dan pengembangan, tata cara kerja, metode kerja, prosedur kerja, standarisasi sarana lingkungan kerja dan ketatalaksanaan;
- b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi tata cara kerja, metode kerja, prosedur kerja, standarisasi sarana lingkungan kerja dan ketatalaksanaan;
- d. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan, pelayanan publik;
- e. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi penataan tatalaksana, prosedur kerja, tata cara kerja, metode kerja dan standarisasi lingkungan kerja;
- f. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- g. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, petunjuk teknis, dan pengembangan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Jambi, maka Susunan Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Biro yaitu :

- 1. Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.
  - b. Sub bagian Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan Cabang Dinas Provinsi.
  - c. Sub bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota.
- 2. Bagian Tatalaksana dan Refrormasi Birokrasi
  - a. Sub bagian Tatalaksana.
  - b. Sub bagian Pelayanan Publik.
  - c. Sub bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3. Bagian Kepegawaian Setda dan Analisis jabatan
  - a. Sub bagian Kepegawaian Sektretariat Daerah dan Budaya Kerja.
  - b. Sub bagian Analisis Jabatan.
  - c. Sub bagian Tata Usaha Biro dan Perpustakaan.

Kepala Bagian sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi serta memimpin Sub Bagian yang berada di bawahnya masing-masing. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan penataan kelembagaan daerah, tatalaksana dan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pelayanan administrasi kepegawaian Setda dan budaya kerja kepada seluruh perangkat daerah dalam provinsi Jambi.

## *BAB II*

# *PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA*

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan

BAB II berisi :  
Perencanaan  
Visi dan Misi  
Kebijakan  
Program  
Perjanjian Kinerja

Perencanaan yang tepat sangat diperlukan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur sebagai upaya menciptakan peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan khususnya pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, dan sebagai acuan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang di

tuangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Penjabaran Program dan Kegiatan dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi untuk mencapai Visi dan Misi, dalam meningkatkan kinerja aparatur yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama Setda Provinsi Jambi yang dikelola Biro-Biro lingkup Setda diarahkan pada tupoksi masing-masing Biro disesuaikan dengan intensitas dan beban kerja masing-masing, agar pencapaian visi dan misi lebih optimal.

#### Tujuan dan Sasaran Pembangunan Setda Provinsi Jambi

##### Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi Setda dalam melaksanakan pembangunan adalah terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan secara berdayaguna dan berhasil guna serta memberikan pelayanan secara teknis administrasi kepada seluruh



jajaran pemerintahan ditingkat Provinsi, dan pelaksanaan koordinasi administrasi pemerintahan pada tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

### Sasaran

Sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah merupakan penjabaran dari misi selama kurun waktu tahun 2010 - 2015, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi Biro Organisasi Setda yang tangguh, akuntabel, handal dan terdepan dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat .
- b. Terwujudnya Koordinasi dan kerjasama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
- c. Terwujudnya kualitas dan pengelolaan sumber daya aparatur kelembagaan, ketatalaksanaan, prasarana dan sarana pemerintah daerah Provinsi Jambi.

### Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka dirumuskan visi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi berdasarkan kebutuhan, potensi sumber daya yang ada, tantangan yang akan dihadapi serta hasil yang akan diharapkan dalam periode kurun waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Sebagai upaya menunjang terwujudnya visi Provinsi Jambi yakni **Jambi TUNTAS 2021**, Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera yang siap menghadapi era globalisasi dan memiliki SDM yang berkualitas, kearifan lokal, beriman, bertakwa, bermoral, rasa toleransi kepedulian sosial yang tinggi, demokratis dan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

maka ditetapkan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yakni : “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Profesional, Responsif Dan Berorientasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021”.

Visi Setda di atas mengandung makna kesungguhan dan semangat jajaran Setda Provinsi Jambi dalam rangka menunjang keberhasilan pemerintah provinsi dalam melaksanakan roda administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Makna strategis dari beberapa ungkapan yang terkandung dalam visi dimaksud dapat diuraikan pada misi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, kerukunan umat beragama.
3. Mewujudkan pelayanan informasi daerah yang berimbang, kokohnya interaksi sosial, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dan inovasi.

### **Kebijakan**

Kebijakan rencana kinerja Biro Organisasi Setda berupa cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi untuk Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang secara garis besarnya diarahkan dapat membantu Sekretaris Daerah dalam rangka perumusan bahan-bahan pembinaan dan kebijakan penyelenggaraan di bidang organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.

## **Program**

Program adalah kumpulan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda maupun dalam rangka kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan program yang ditetapkan oleh Biro Organisasi Setda adalah :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.
2. Peningkatan, pembinaan dan pengembangan kinerja pelayanan dan disiplin sumber daya aparatur.
3. Peningkatan rasionalisasi pengelolaan dan pendayagunaan keuangan, prasarana dan sarana pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan, pembicaraan dan hubungan kemasyarakatan serta pemberdayaan perempuan, kesehatan dan lingkungan.
4. Aksentuasi akuntabilitas dan konsistensi pemerintahan.
5. Pembinaan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja perangkat daerah.
6. Pengisian, penempatan dan pengalokasian sumber daya aparatur sesuai pelimpahan kewenangan Gubernur.
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Provinsi Jambi.

## **Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja yang dituangkan dalam indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika

terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perjanjian kinerja Biro Organisasi Setda tersebut dimanfaatkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 menuju JAMBI TUNTAS Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Misi 1. Menjadikan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi kesekretariatan daerah yang tangguh, handal dan terdepan dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan.

No	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase OPD tepat ukuran tepat fungsi
2.	Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.	Skor PMPRB Provinsi Jambi
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Provinsi Jambi	Skor IKM Provinsi Jambi
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Provinsi Jambi
5.	Terciptanya sistem pembinaan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran instansi Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Jambi

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4.  
Perjanjian Kinerja Misi 1

Misi 1. Menjadikan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi kesekretariatan daerah yang tangguh, handal dan terdepan dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan.			
No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase OPD tepat ukuran tepat fungsi	86 %
2.	Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.	Skor PMPRB Provinsi Jambi	60,10
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Provinsi Jambi	Skor IKM Provinsi Jambi	85
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Provinsi Jambi	62 (B)
5	Terciptanya sistem pembinaan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran instansi Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Jambi	10 Pergub



# *BAB III*

# *AKUNTABILITAS*

# *KINERJA*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menguraikan secara detail tentang kinerja aktual Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai wujud akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama tahun 2018 yang sudah direncanakan sebelumnya melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang kemudian dituangkan lagi ke dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 .

#### BAB III berisi :

Analisis Capaian Kinerja  
dan Pengukuran Kinerja  
Misi 1  
Analisis Capaian Kinerja  
dan Pengukuran Kinerja  
Misi 2  
Analisis Capaian Kinerja  
dan Pengukuran Kinerja  
Misi 3

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja}}{\text{Indikator Kinerja}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kriteria pengukuran kinerja secara umum yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

<u>No.</u>	<u>Rentang Capaian</u>	<u>Kategori Capaian</u>
1.	Lebih dari 90%	Sangat Baik
2.	70% sampai dengan 89,99%	Baik
3.	55% sampai dengan 69,99%	Cukup
4.	Kurang dari 54,99%	Kurang

Adapun capaian kinerja sasaran Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 terlihat pada form pengukuran kinerja. Capaian kinerja merupakan wujud aktual sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat dalam 3 (tiga) misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Untuk itu, berikut ini dilakukan pengukuran tingkat realisasi dan pembahasan akuntabilitas selama Tahun 2018 .

### **Analisis Capaian Kinerja dan Pengukuran Kinerja**

Misi I      Menjadikan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi kesekretariatan daerah yang tangguh, handal dan terdepan dalam memberikan pelayanan adminstratif kepada seluruh perangkat pemerintahan.

.

Tabel 1  
Pengukuran Kinerja Misi 1

No.	Sasaran	Indikator	Capaian		2018		
			2016	2017	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase OPD tepat ukuran tepat fungsi	6 OPD	6 OPD	10 OPD	10 OPD	100
2.	Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.	Skor PMPRB Provinsi Jambi	35,33	51,35	60,10	57,83	96,22
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Provinsi Jambi	Skor IKM Provinsi Jambi	78,76	80,00	85	80,60	94,83
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Provinsi Jambi	CC	CC	62 (B)	58,36 (CC)	94,13
5.	Terciptanya sistem pembinaan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran instansi Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Jambi	10 Pergub	Draft Pergub	10 Pergub	25 Pergub	150

**Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Akuntabilitas Ketatalaksanaan serta Kelembagaan Organisasi Kesekretariatan Daerah**

Dalam mendukung terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas ketatalaksanaan serta kelembagaan organisasi perangkat daerah menuju kelembagaan, dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan penguatan kemandirian otonomi daerah, diwujudkan dalam program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan, Peraturan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Pembinaan OPD Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di berikut :

Tabel 2  
Pengukuran Kinerja Misi 1

Indikator kinerja	Target	Realisasi
1. Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	10	10
2. Jumlah Pergub Perangkat Daerah Prov. Jambi	5	5
3. Jumlah UPTD yang di evaluasi	25	25

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja telah mencapai 100% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

2. Kegiatan Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan, serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

3. Tabel 1  
Pengukuran Kinerja Misi 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1. Jumlah bimtek penyusunan komponen SAKIP perangkat daerah Provinsi Jambi	1 kali	1 kali
2. Jumlah bimtek penyusunan komponen SAKIP Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali
3. Jumlah asistensi/pendampingan penguatan SAKIP perangkat daerah Provinsi Jambi	20 OPD	20 OPD

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam penguatan SAKIP	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota
5. Frekuensi monitoring capaian kinerja perangkat daerah Provinsi Jambi	4 kali	4 kali
6. Jumlah evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jambi	1 kali	1 kali

#### 4. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1. Jumlah Bimtek pemenuhan komponen standar pelayanan publik	1 kali	1 kali
2. Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	1 kali	1 kali
3. Jumlah pembinaan peningkatan kualitas pelayanan public perangkat daerah	20 OPD	20 OPD
4. Jumlah pelaksanaan Sosialisasi inovasi pelayanan publik	1 kali	1 kali
5. Jumlah proposal inovasi pelayanan publik	6 proposal	6 proposal
6. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota
7. Frekuensi monitoring capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan public perangkat daerah	4 kali	4 kali

#### 5. Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Penataan Tatalaksana, Reformasi Birokrasi, AD-PPK, dan LHKPN/LHKASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1. Jumlah pembinaan penyusunan SOP perangkat daerah	10 OPD	10 OPD
2. Jumlah monitoring penerapan Pergub Pakaian Dinas	43 OPD	43 OPD
3. Jumlah monitoring penerapan Pergub Tata Naskah Dinas	43 OPD	43 OPD
4. Jumlah Rakor Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	1 Kali	1 Kali
5. Jumlah monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8 Pokja	8 Pokja
6. Jumlah pembinaan penerapan Tatalaksana dan eformasi Birokrasi Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota



6. Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1. Jumlah Keputusan Gubernur tentang Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Jambi	10	25
2. Jumlah Rakor Bidang Analisis Jabatan	1	1
3. Jumlah SKPD yang divalidasi Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	43	43

7. Kegiatan Pembinaan dan Rakor Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi sistem kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja capaian pembinaan terhadap Perangkat Daerah 11 Kab/Kota.
8. Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Jambi dengan target kinerja “B” yang merupakan domain Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi guna mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, sebagai upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, maka telah disiapkan sumber daya aparatur melalui kegiatan Bimtek atau Pendampingan penyusunan Komponen SAKIP bagi penyusun komponen akuntabilitas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, disamping memfasilitasi secara langsung secara personal tim penyusun dokumen akuntabilitas.
9. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan mendapatkan penilaian yang semakin positif dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia karena kualitas dokumen pelaporan yang semakin meningkat.

10. Laporan hasil evaluasi atas dokumen AKIP Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016 yang dievaluasi tahun 2017 menunjukkan bahwa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan laporan kinerja (LAKIP) serta laporan hasil realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalami perbaikan dan peningkatan nilai yang cukup berarti. Penguatan sistem akuntabilitas yang terbangun diantara stakeholder terkait seperti Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi serta adanya komitmen pimpinan, telah membawa hasil yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Jambi yang mendapatkan predikat “CC” dengan total nilai **51,35**. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni predikat CC dengan nilai 59.36. Penurunan ini dikarenakan terjadinya perubahan dalam template evaluasi kinerja yang menjadi lebih detil. Kedepan, diharapkan nilai LHE AKIP Provinsi Jambi akan terus meningkat sejalan dengan komitmen dari Kepala daerah beserta perangkat-perangkatnya.

Sebagai tindak lanjut dari laporan hasil evaluasi AKIP tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi diminta tetap konsisten untuk melaksanakan poin-poin perubahan dengan menjaga sistem akuntabilitas yang sudah terbangun antara stakeholders primer yakni, Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Kegiatan Pemantapan Koordinasi Pembinaan Pelayanan Publik dan Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik diarahkan sebagai langkah strategis dalam upaya terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang prima, transparan dan akuntabel. Kegiatan yang terimplementasi dalam kegiatan diantaranya pembinaan terhadap unit pelayanan publik, diarahkan sebagai langkah strategis dalam upaya terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang prima, transparan dan akuntabel. Penilaian/pemeringkatan unit pelayanan publik yang dilakukan ke unit pelayanan yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian 100%.

Selain itu, sebagai bentuk kegiatan dari Unit Pelayanan Publik juga penyusunan dan penerapan Pergub tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Indikator persentase pemanfaatan hasil analisis beban kerja yang dikelola oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi demi terwujudnya penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang dituangkan dalam 2 (dua) kegiatan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS, bertujuan menyusun instrumen analisis jabatan PNS Provinsi Jambi bagi 43 Perangkat Daerah dan 11 Kabupaten/Kota. Kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan ini telah dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian 150% dan telah terealisasi dalam bentuk 25 (dua puluh lima) Peraturan Gubernur.
2. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Analisis Beban Kerja telah dilaksanakan secara maksimal (150%), dengan output terlaksananya penghitungan kebutuhan Pelaksana di Provinsi Jambi, kegiatan ini dimaksudkan menghasilkan outcome tersusunnya Beban Kerja PNS di Provinsi Jambi dan Sinkronisasi Penataan dan Pemetaan Jabatan Pelaksana Provinsi Jambi dengan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Permenpan Nomor 25 Tahun 2016.

Dalam rangka mengupayakan penempatan aparatur yang menduduki jabatan struktural agar sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja yang dimiliki mulai dari eselon I, II, III, dan IV, maka telah diterbitkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Disamping itu, dalam hal analisis jabatan pada Tahun 2018 telah dilakukan analisis terhadap jabatan lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, khususnya pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada tahun 2018 ini telah diterbitkan Kepgub mengenai analisis jabatan di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Diharapkan pada tahun 2018 analisis telah dilakukan di semua SKPD Pemerintah Provinsi Jambi.

Indikator sebagaimana tersebut di atas merupakan capaian dari Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur secara umum bertujuan untuk mendukung penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, melalui program ini hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pada tahun 2018, telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 2.900.000,- dengan realisasi sebesar 99,73%. Adapun output yang diharapkan melalui program ini adalah tersusunnya peraturan gubernur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, tersusunnya peraturan gubernur tentang jabatan fungsional teknis, serta terlaksananya sosialisasi sasaran kinerja pegawai, terlaksananya Bimtek Analisis Beban Kerja, serta terlaksananya sosialisasi sistem informasi faktor jabatan dan kajian tunjangan kinerja.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah berhasil menyelesaikan target yang telah diberikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jambi tentang Analisis Jabatan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah masih kurangnya SDM yang mampu

menyusun analisis beban kerja dan analisis beban kerja, serta panjangnya tahapan dalam penyusunan instrumen anjab ini menyebabkan proses penyusunan berjalan lambat. Untuk itu, sebagai solusinya, diperlukan pembekalan yang memadai terhadap SDM yang ada melalui bimtek/kursus analisis jabatan dan analisis beban kerja.

# *BAB IV*

# *PENUTUP*





## BAB IV PENUTUP

BAB IV berisi :  
Kesimpulan Hasil Capaian  
Kinerja

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tiga sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 telah dapat dicapai dengan baik, karena tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya telah dicapai di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas program pembangunan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, pelayanan administrasi kepegawaian Setda dan budaya kerja serta analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkup Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui Bagian-Bagian di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi berjalan dengan sangat baik. Hal ini telah menggambarkan bahwa komitmen jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam mendukung perwujudan visi Jambi, yakni “Jambi TUNTAS Tahun 2021”, Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera.

Selanjutnya, secara keseluruhan, capaian kinerja dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2018 akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis sebagai upaya memecahkan permasalahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2018, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah (solusi) yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
3. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Biro Organisasi Setda dengan pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholders*) dalam merumuskan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan media akuntabilitas tahun kedua untuk pelaksanaan Renstra 2016-2021. Namun demikian, LKj ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, sehingga implementasi sistem LKj diharapkan akan lebih baik pada masa mendatang.

Akhir kata, kami segenap Tim Penyusun LKj Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 mengharapkan agar LKj ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.



**Pemerintah Provinsi Jambi**

**BIRO ORGANISASI  
SETDA PROVINSI  
JAMBI**

**Jl. Jend. A. Yani No. 1  
Telanaipura Jambi**